

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu daud Busroh. 1985, *Azas-azas hukum tata negara* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. 1987. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa : Bandung
- J Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer:Jakarta.
- Kartiwa, A., 2006. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”. PusatInformasi Proses Legislasi Indonesia.

- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1994, *Demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta: GramediaPustakaUtama
- M. Ryaas Rasyid. 2002, *Menolak resentralisasi pemerintahan* Jakarta Millennium Publisher
- M.R. Khairul Muluk. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITS Press : Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rozali Abdullah. 2000, *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalism sebagai suatu alternatif* Jakarta, Raja GrafindoPersada
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, RinekaCipta, Yogyakarta.
- Siswandian Indra Iman, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Sihombing, Edison. 2007. *Penganggaran 2008*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu, 6 Juli, 2011.

Winardi. 2000, *Kepemimpinan dalam manajemen* Jakarta, Rineka Cipta.

B. Jurnal, Tesis dan Skripsi

Abdurrahim Odeyani, Marthen Ariedan, H.M. Djafar Saidi 2012, Fungsi

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Di Kabupaten Halmahera Tengah, Jurnal Odeyani A
Odeyani, M Arie, HMD Saidi - pasca.unhas.ac.id

I Wayan Suasta, Achmad Ruslan dan Marthen Arie, 2010, Mekanisme

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penghapusan
Barang Milik Daerah Di Kabupaten Banggai- pasca.unhas.ac.id

dr. Ali hanapiah muhi, MP. 2011, Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
jurnal IPDN

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi
Pengawasan Oleh M. Agus Santoso

Kuncoro Thesaurianto. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan daerah terhadap
Kemandirian Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sri Haryati,. 2006. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan
Setelah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000
dan 2001-2003*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Universitas Islam
Indonesia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Keuangan Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417.

D. Internet

www.tempo.co/read/news/sumatera/2005/08/058

www.parlemen.net